

PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DI INDONESIA BERBASIS TRIPLE HELIX: PENDEKATAN KONSEPTUAL

Rudy Badrudin

Shita Lusi Wardhani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta

E-mail: rudy.badrudin@stieykp.ac.id

ABSTRACT

The unemployment in Indonesia from college graduates students are relatively high, one of the reason because they have relatively low entrepreneurship skill level. The condition occurs because the majority of graduate students tend to be job seekers rather than job creators. This is due to the learning system in various universities that has focused on how to prepare the students to graduate soon and get a job, instead of preparing graduate students to become jobs creator. This conceptual study aims to analyze the development of Triple Helix-based entrepreneurship which involving universities, companies, and governments and analyze the effect to decrease the unemployment of graduate students. The results of this study indicate that the conceptual development of entrepreneurship in Indonesia can be done by taking the perspective of the relationship and the commitment of three parties such as academician, businessmen, and government in a symbiotic mutualistic relationship between the three of them. Therefore the entrepreneurship development strategy for graduate students in Indonesia can be done through the internal and external of entrepreneurship education in universities and should be supported from the existence of community development.

Keywords: entrepreneurship, triple helix, community development

JEL Classification: L26

PENDAHULUAN

Menurut data Badan Pusat Statistik (2013), angka pengangguran terbuka pada bulan Februari 2013 sebesar 5,92% dan pada bulan Agustus 2013 naik menjadi 6,25%. Dua tahun sebelumnya (2011), angka pengangguran terbuka di Indonesia sebesar 6,8% atau 8,1 juta dan persentase terbesar adalah lulusan perguruan tinggi yang mencapai 21,5% (sarjana sebesar 9,9% dan diploma sebesar 11,6%). Dalam angka absolut, angka pengangguran terbuka pada tahun 2013 sebanyak 7.390.000 jiwa dan yang berasal dari lulusan perguruan tinggi (sarjana) sebanyak 360.000 jiwa atau sebesar 4,87%. Walaupun secara absolut angka pengangguran terbuka masih lumayan besar, namun apabila dibandingkan dengan angka pengangguran terbuka pada tahun 2011 dan yang berasal dari lulusan perguruan tinggi (9,9%), maka tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2013 dan yang berasal dari lulusan perguruan tinggi mengalami penurunan (4,87%). Walaupun mengalami penurunan, namun setiap tahun angka pengangguran tetap menjadi permasalahan yang harus dicarikan penyelesaiannya.

Aktivitas kewirausahaan yang diterjemahkan sebagai individu aktif dalam memulai bisnis baru dan dinyatakan dalam persen total penduduk aktif bekerja relatif masih relatif rendah. Kondisi tersebut terjadi karena kenyataan bahwa sebagian besar lulusan Perguruan Tinggi cenderung lebih sebagai pencari kerja daripada pencipta lapangan pekerjaan. Hal ini disebabkan sistem pembelajaran yang diterapkan di

berbagai perguruan tinggi saat ini masih terfokus pada bagaimana menyiapkan para mahasiswa yang cepat lulus dan mendapatkan pekerjaan, bukan menyiapkan para mahasiswa lulusan yang siap menciptakan pekerjaan. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2013), semakin tinggi aktivitas kewirausahaan maka semakin tinggi Entrepreneurship Level suatu negara. Pada tahun 2013, aktivitas kewirausahaan di Indonesia hanya sebesar 1,56%, tertinggal dengan Malaysia, Singapura, dan Thailand yang rata-rata di atas 4% (Ikatan Bankir Indonesia, 2012). Indonesia tertinggal jauh dari Amerika Serikat (20%), Jepang (25%), dan Singapura (7%) (Kompas, 14 September 2014).

Walaupun angka pengangguran terbuka yang berasal dari lulusan perguruan tinggi masih relatif tinggi dan Entrepreneurship Level masih relatif rendah namun penurunan angka pengangguran terbuka yang berasal dari lulusan perguruan tinggi dari 9,9% (2011) menjadi 4,87% (2013) merupakan dampak positif dari pemberlakuan kurikulum baru di perguruan tinggi dan berbagai program kegiatan yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk menunjang pengembangan kewirausahaan di Indonesia. Sebagai contoh, sejak tahun 2009 pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2013) meluncurkan Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) untuk dilaksanakan dan dikembangkan di perguruan tinggi. Program tersebut dilaksanakan di seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan di beberapa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) hasil seleksi Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) dengan alokasi dana yang berbeda-beda. PMW bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap atau jiwa wirausaha (entrepreneurship) berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) kepada para mahasiswa agar dapat mengubah pola pikir dari pencari kerja menjadi pencipta lapangan pekerjaan, serta menjadi pengusaha tangguh dan sukses dalam menghadapi persaingan global. Dalam rangka keberlanjutan program, PMW juga bertujuan mendorong kelembagaan pada perguruan tinggi agar mendukung pengembangan program-program kewirausahaan. Sebagai hasil akhir, diharapkan terjadinya penurunan angka pengangguran lulusan pendidikan tinggi.

Sejalan dengan perkembangan perekonomian,

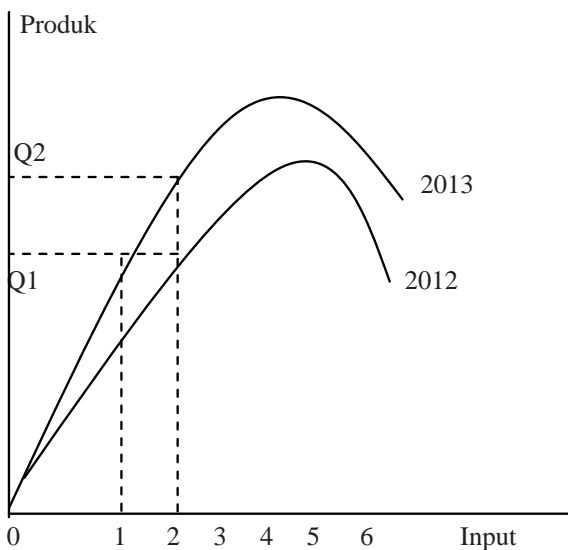
sejak tahun 16 Agustus 2007 pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dalam Pasal 74 dijelaskan bahwa perusahaan dengan bentuk perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagai kewajiban perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Apabila perusahaan tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Berdasarkan ketentuan tersebut maka terbuka kesempatan untuk mengembangkan program-program kewirausahaan dengan menggunakan alokasi anggaran yang disediakan oleh perusahaan dalam rangka perusahaan menjalankan ketentuan peraturan perundangan tersebut. Inilah yang menarik penulis untuk melakukan penelitian konseptual pengembangan kewirausahaan berbasis Triple Helix. Tujuan penulis memilih penelitian konseptual tentang "Pengembangan Kewirausahaan di Indonesia Berbasis Triple Helix: Pendekatan Konseptual" untuk menganalisis pengembangan kewirausahaan berbasis Triple Helix yang melibatkan perguruan tinggi, perusahaan, dan pemerintah sehingga mampu memberikan dampak dalam penurunan angka pengangguran lulusan pendidikan tinggi.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Menurut Meredith, et al. (2002), kewirausahaan adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi yang berupa ide inovatif dalam menjalankan sesuatu agar mencapai tujuan yang diharapkan. Kewirausahaan mempunyai ciri percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, pengambil risiko, kepemimpinan, keorisinilan, dan berorientasi pada masa depan. Inti kewirausahaan adalah menawarkan sesuatu yang berguna bagi pihak lain. Semakin besar kebutuhan pihak lain akan produk barang dan jasa yang dihasilkan karena ada tawaran produk barang dan jasa yang berguna bagi pihak lain, maka semakin besar imbalan yang akan diperoleh.

Menurut Setyawati (2011), kegiatan entrepreneur dalam suatu perusahaan memungkinkan perusa-

haan menghasilkan lebih banyak produk dengan jumlah input yang sama, atau menghasilkan jumlah produk yang sama dengan input sedikit. Dengan kata lain, kegiatan entrepreneur ekuivalen dengan perubahan fungsi produksi. Hal ini dapat dijelaskan dengan Gambar 1 yang memberikan ilustrasi bagaimana perkembangan teknologi dalam bentuk kegiatan entrepreneur dapat menggeser kurva produk total. Garis yang ada di bawah menunjukkan produk yang dihasilkan pada tahun 2012. Garis yang ada di atas menunjukkan produk yang dihasilkan pada tahun 2013. Pada tahun 2012, dengan fungsi produksi terbaik yang dimiliki pada saat itu, dapat dihasilkan produk sebanyak OQ1 dengan input sebanyak 2. Pada tahun 2013, dengan adanya kegiatan entrepreneur, dengan jumlah input yang sama dapat dihasilkan produk dengan jumlah yang lebih banyak yaitu sebesar OQ2. Atau, pada tingkat produk yang sama (OQ1), input yang dibutuhkan lebih banyak pada tahun 2012 (2 input) daripada tahun 2013 (1 input).



Sumber: Setyawati dkk. (2011).

Gambar 1
Kegiatan Entrepreneur

Hasil penelitian Isa (2011) menunjukkan bahwa kompetensi kewirausahaan yang diukur dengan indikator initiative dan enterprises, planning dan organizing, dan teknologi, serta orientasi kewirausahaan

berpengaruh terhadap kinerja. Di samping itu, variabel orientasi kewirausahaan memediasi hubungan antara kompetensi kewirausahaan dan kinerja usaha. Kompetensi kewirausahaan merupakan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terhubung satu dengan lainnya, yang diperlukan pengusaha untuk dilatih dan dikembangkan agar mampu menghasilkan kinerja terbaik dalam mengelola usahanya. Orientasi kewirausahaan sebagai kecenderungan individu untuk melakukan inovasi, proaktif, dan mau mengambil risiko untuk memulai atau mengelola usaha.

Hasil penelitian Rachmat (2012) menunjukkan bahwa peran dunia pendidikan sangat vital untuk menumbuhkan serta mengembangkan semangat entrepreneur. Pendidikan entrepreneur yang diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan berpotensi memberikan sejumlah peluang bagi individu dalam memberikan manfaat ekonomi melalui kontribusinya pada penciptaan lapangan kerja, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian Rachmat (2012) memberikan kerangka kerja bagi dunia pendidikan mengenai bagaimana menumbuhkembangkan dan memelihara semangat entrepreneurship, yaitu dengan mendisain kurikulum kewirausahaan yang berbasis pada penguatan keyakinan atas kemampuan diri serta pada penguatan hal-hal yang merefleksikan semangat entrepreneurship yang kuat di antaranya penguatan keaktifan imajinasi, penguatan daya cipta dan minat berkreasi, penghargaan kepada pengalaman-pengalaman berkreasi, serta memberi penguatan melalui dukungan sosial.

Hasil penelitian Pujiastuti (2013) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kepribadian dan lingkungan terhadap intensi berwirausaha. Kepribadian merupakan faktor yang mempengaruhi intensi berwirausaha. Hal ini dibenarkan karena wirausahaan adalah seseorang yang mampu melakukan aktualisasi dari keempat sisi potensial yang dimiliki secara tepat dan berkelanjutan. Empat sisi potensial yang dimiliki manusia, yaitu sikap awareness (mawas diri), conscience (mempertajam suara hati supaya menjadi manusia berkehendak baik serta memiliki misi dalam hidup, independent will (pandangan independen untuk bekal bertindak dan kekuatan untuk mentransendensi, dan creative imagination (berfikir transenden dan mengarah ke jangka panjang untuk memecahkan masalah dengan imajinasi). Lingkungan sosial merupakan lingkungan di mana terjadi interaksi antara individu

yang satu dengan yang lain. Lingkungan sosial ini ada yang primer dan sekunder. Lingkungan primer terjadi apabila di antara individu yang satu dengan yang lain mempunyai hubungan yang erat dan saling mengenal dengan baik, misalnya keluarga. Lingkungan demikian akan mempunyai pengaruh yang mendalam terhadap perkembangan individu. Lingkungan sekunder adalah suatu lingkungan di mana antara individu yang ada di dalamnya mempunyai hubungan dengan individu lainnya namun relatif tidak mendalam.

Hasil penelitian Mulyatiningsih (2013) menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan kompetensi kewirausahaan antara industri dan mahasiswa teknik boga. Rerata kompetensi kewirausahaan industri selalu lebih tinggi dari rerata kompetensi kewirausahaan mahasiswa. Ranking rerata skor kompetensi kewirausahaan tertinggi terletak pada kompetensi sosial. Industri dan mahasiswa memiliki kesenjangan kompetensi kewirausahaan terdapat pada dimensi kompetensi manajerial, kepemimpinan, bisnis dan administrasi. Kewirausahaan dibangun dari indikator kompetensi manajerial, konseptual, teknis produksi, sosial, komunikasi, dan sikap kerja.

Hasil penelitian Nursisto (2013) menunjukkan bahwa intensi kewirausahaan mahasiswa dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal mahasiswa. Faktor eksternal dari luar mahasiswa, yaitu pendidikan kewirausahaan yang membentuk pengetahuan kewirausahaan mahasiswa sedang faktor internal dalam diri mahasiswa, yaitu efikasi diri. Selanjutnya, kedua faktor eksternal dan internal mahasiswa tersebut mempengaruhi bersama terhadap intensi kewirausahaan mahasiswa.

Hasil penelitian Sony (2013) menunjukkan bahwa 1) pendidik yang berhasil mengembangkan pendidikan kewirausahaan yang menghasilkan lulusan yang berwirausaha adalah pendidik yang memiliki usaha dahulu atau memiliki kompetensi di bidangnya, memiliki semangat dan motivasi serta terlibat aktif sebagai mentor yang baik bagi peserta didiknya; 2) kurikulum dan silabus sangat mempengaruhi proses belajar mengajar di program pendidikan kewirausahaan, artinya Entrepreneurial Learning Model (ELM) telah diterapkan dengan baik dalam proses pembelajaran kewirausahaan; dan 3) pendidikan kewirausahaan dengan cara mengubah mindset peserta didik akan menghasilkan lulusan yang berkualitas.

Hasil penelitian Soeprpto (2013) menunjukkan bahwa pendidikan kewirausahaan sebagai pengembangan kewirausahaan nasional merupakan upaya sistematis dan kompleks yang membutuhkan sinergitas multipihak. Pendekatan triple helix yang melibatkan kerjasama tiga unsur, yaitu perguruan tinggi, perusahaan, dan pemerintah dapat digunakan sebagai upaya sistematis untuk menanggulangi kompleksitas dalam pengembangan kewirausahaan nasional sehingga dapat menghasilkan sistem dan pendidikan kewirausahaan yang komprehensif yang mampu menghasilkan wirausahawan yang inovatif.

Menurut Badrudin (2013), Schumpeter menjelaskan dua hal penting, pertama sistem kapitalisme merupakan sistem yang paling baik untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang pesat dan kedua faktor utama yang mengakibatkan perkembangan ekonomi adalah proses inovasi yang dilakukan oleh entrepreneur. Lima macam kegiatan yang dimasukkan sebagai proses inovasi adalah 1) diperkenalkannya produk baru yang sebelumnya tidak ada; 2) diperkenalkannya cara berproduksi baru; 3) pembukaan daerah pasar baru; 4) penemuan sumber bahan mentah baru; dan 5) perubahan organisasi industri sehingga menjadi efisiensi industri. Kelima macam kegiatan proses inovasi tersebut dilakukan oleh entrepreneur, yaitu orang yang terjun dalam dunia bisnis dengan semangat dan keberanian untuk menerapkan ide-ide baru menjadi kenyataan dan berani mengambil risiko bisnis karena ide-ide baru tersebut belum pernah dicoba diterapkan secara ekonomis.

Perguruan tinggi sebagai tempat sandaran terakhir mahasiswa dalam menggapai ilmu sebelum memasuki dunia kerja hendaknya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memahami tentang entrepreneurship melalui beberapa tahapan. Pada tahapan kesadaran (awareness), mahasiswa akan menyadari permasalahan masa depan pascakuliah di perguruan tinggi. Berdasarkan kesadaran tersebut mahasiswa akan menyelesaikan permasalahan masa depannya melalui keterlibatannya (involvement) dalam penanganan masalah tersebut. Keterlibatan dalam penanganan masalah akan menghasilkan suatu komitmen (commitment) untuk selalu berpartisipasi (participation) dalam memahami entrepreneurship melalui kegiatan kemahasiswaan yang diikutinya (Badrudin, 2013).

HASIL PENELITIAN

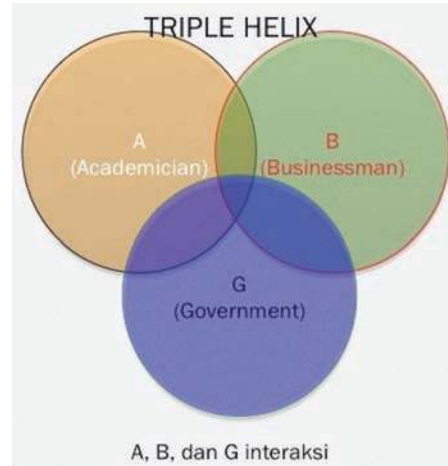
Menurut Kadiman (2005), pengembangan kewirausahaan dapat dilakukan dengan memperhatikan perspektif keterkaitan berbagai pihak dengan komitmen dan kerja nyata dari ketiga aspek yang disebut sebagai Triple Helix (Gambar 2), yang meliputi A (academician), B (businessman), dan G (government). Triple Helix merupakan salah satu solusi dari kendala-kendala yang dihadapi oleh para pelaku ekonomi dan mawadahi terciptanya “simbiosis mutualistik” antara ketiga pihak yang terlibat di dalamnya. Hubungan yang lebih terbuka dan saling menguntungkan diharapkan dapat dilakukan antara pihak akademisi (perguruan tinggi) dengan pemerintah, akademisi (perguruan tinggi) dengan pengusaha, dan pengusaha dengan pemerintah dalam sebuah irisan antara ketiga hubungan tersebut.

Tri Dharma Perguruan Tinggi menyebutkan bahwa kewajiban dosen adalah melakukan pengajaran dan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pada Tri Dharma pertama, kegiatan pendidikan dan pengajaran merupakan transfer of knowledge ilmu pengetahuan yang telah dikembangkan melalui penelitian di perguruan tinggi mulai dari pendidikan program sarjana, pendidikan program magister, pendidikan program doktor dalam suatu disiplin ilmu, dan pendidikan jalur vokasional atau non gelar (diploma).

Pada Tri Dharma kedua, kegiatan penelitian mempunyai peranan penting dalam rangka kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan terhambat. Penelitian berkaitan dengan pembangunan dalam arti luas, karena hasil penelitian diperlukan atau langsung dapat digunakan oleh masyarakat pada saat itu dan harus dilihat dengan kebutuhan masa depan. Dengan kata lain, penelitian di perguruan tinggi tidak hanya diarahkan untuk penelitian terapan saja, tetapi juga melaksanakan penelitian ilmu-ilmu dasar yang manfaatnya baru terasa penting untuk masa depan.

Pada Tri Dharma ketiga, kegiatan pengabdian pada masyarakat merupakan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dikembangkan di perguruan tinggi. Kegiatan pengabdian pada masyarakat merupakan rangkaian aktivitas dalam rangka kontribusi perguruan tinggi terhadap masyarakat yang bersifat nyata dan langsung dirasakan manfaatnya. Berdasarkan kegiatan pengabdian pada masyarakat,

diharapkan ada umpan balik dari masyarakat kepada perguruan tinggi sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lebih lanjut.



Gambar 2
Model Pengembangan Kewirausahaan dengan Triple Helix

Sumber: Kadiman (2005)

Pihak pebisnis/industri mempunyai kewajiban untuk memberikan kontribusi dalam menciptakan iklim bisnis yang baik, seperti menerapkan etika berbisnis, berkomitmen pada corporate social responsibility (CSR), dan menjadi mitra pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional. Kotler & Nancy Lee (2004) menjelaskan bahwa CSR merupakan komponen penting dalam menunjang strategi perusahaan memenuhi visi, misi, dan tujuan perusahaan. Oleh karena itu, penerapan CSR harus sejalan dan menunjang kegiatan bisnis perusahaan. Menurut Kotler dan Nancy Lee (2004) ada 6 (enam) pilihan dalam menjalankan CSR, yaitu cause promotion, cause related marketing, corporate social marketing, corporate philanthropy, community volunteering, dan social responsible business practices (Badrudin, 2013 dan Elisawati, 2008). Enam CSR tersebut telah dipilih untuk dijalankan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Cause promotion. Perusahaan melakukan CSR

dalam bentuk dukungan (sponsor) terhadap sebuah kegiatan sosial yang sedang menjadi perhatian masyarakat untuk meningkatkan citra sebuah perusahaan. Sebagai contoh, penyelenggaraan fun walk, fun bike, gerakan penghijauan, endemi flu burung, perusahaan telekomunikasi yang menyediakan fasilitas telepon gratis di lokasi bencana alam, PT. Unilever yang mendukung kampanye hijau, dan PT. Djarum yang melakukan CSR di bidang bulutangkis; mendirikan sekolah bulutangkis, membuat klub, memberikan beasiswa, dan rutin melakukan aneka lomba dan mensponsori berbagai acara bulutangkis baik nasional maupun internasional.

Cause-related marketing. Perusahaan melakukan CSR dalam bentuk pemberian sumbangan atau donasi berdasarkan nilai persentase dari hasil penjualan. CSR semacam ini adalah yang paling banyak dilakukan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sebagai contoh, pemberian donasi berdasarkan persentase dari hasil short message service (SMS) pelanggan selama kurun waktu tertentu untuk kepentingan pendidikan. Tujuan program ini adalah mengembangkan emotional relationship antara produsen dan pelanggan, melalui keterlibatan keduanya dalam program sosial.

Corporate social marketing. Perusahaan melakukan CSR melalui kampanye untuk mengubah perilaku masyarakat seperti meningkatkan kesadaran hidup sehat, pemeliharaan lingkungan, dan lain-lain. Gerakan cuci tangan yang dilakukan oleh sebuah produsen sabun, bertujuan membiasakan masyarakat mencuci tangan sebelum melakukan pelbagai aktivitas. **Corporate philanthropy.** Perusahaan melakukan CSR dalam bentuk donasi kepada masyarakat yang memerlukan. Artinya, philanthropy dilakukan untuk mendukung tujuan bisnis perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan teknologi informasi memberikan donasi berupa fasilitas internet gratis kepada sebuah desa.

Community volunteering. Perusahaan melakukan CSR berdasarkan besaran waktu (jam atau tahun) dari jam kerja karyawannya untuk pekerjaan sosial. Kegiatan ini dihitung dalam key performance indicator setiap karyawan. Karyawan dapat bekerja sebagai sukarelawan. **Social responsible business practices.** Perusahaan melakukan CSR dengan mengadopsi praktik bisnis yang sesuai dengan isu sosial yang terjadi. Sebagai contoh, perusahaan eceran (retailer) yang mulai menggunakan kertas daur ulang untuk kemasan

produknya.

Enam pendekatan tersebut dapat menjadi acuan perusahaan yang ingin menyertakan program CSR sebagai bagian operasional bisnisnya. Tentunya, CSR yang dipilih harus sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Menurut Kotler & Nancy Lee (2004), patokan kesuksesan sebuah CSR adalah kemampuannya dalam menunjang pencapaian strategi dan tujuan perusahaan. CSR menjadi wahana yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan begitu, CSR tidak akan disalahgunakan atau diposisikan hanya sebagai marketing gimmick untuk pengelabuan citra perusahaan (corporate greenwash) belaka. Keberhasilan CSR, menurut berbagai sumber ditentukan oleh pendekatan kemitraan antara program perusahaan, pemerintah, dan program pendampingan organisasi masyarakat sipil. Pendekatan kemitraan adalah unsur yang paling menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan CSR (A+ CSR Indonesia, 2010).

Menurut Badrudin (2012), fungsi pemerintah ada tiga hal yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi dalam kebijakan publik adalah fungsi penyediaan barang publik atau proses alokasi sumber daya untuk digunakan sebagai barang pribadi atau barang publik dan bagaimana komposisi barang publik ditetapkan. Dilihat dari fungsi alokasi, suatu barang publik tidak dapat disediakan melalui mekanisme pasar karena tidak efisien. Hubungan antara produsen dan konsumen yang terjadi dalam mekanisme pasar tidak ada dan pemerintahlah yang harus bersedia memproduksi barang publik. Fungsi distribusi dalam kebijakan publik merupakan penyesuaian terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan untuk menjamin pemerataan dan keadilan. Dilihat dari fungsi distribusi, fungsi distribusi mempunyai sifat yang lebih sulit dipecahkan dibanding fungsi alokasi dan merupakan permasalahan utama dalam penentuan kebijakan publik. Fungsi distribusi mempunyai peranan penting dalam kebijakan pajak dan transfer. Tanpa adanya intervensi kebijakan, distribusi pendapatan dan kekayaan akan tergantung pada ketersediaan sumber daya alam dan kepemilikan kekayaan. Permasalahannya terletak pada aspek pemerataan dan keadilan. Hal inilah yang selanjutnya diperhitungkan dalam merancang kebijakan distribusi. Fungsi stabilisasi dalam kebijakan publik adalah penggunaan kebijakan anggaran sebagai alat untuk mempertahankan tingkat kesempatan kerja,

stabilitas ekonomi, dan laju pertumbuhan ekonomi, dengan memperhitungkan akibat kebijakan pada perdagangan dan neraca pembayaran. Suatu kebijakan publik, misalnya pengenaan pajak dan pengeluaran publik, dapat secara simultan diarahkan kepada ketiga tujuan tersebut. Permasalahan utama adalah merancang kebijakan anggaran sehingga ketiga tujuan tersebut dapat dicapai secara lebih terpadu, sehingga perekonomian tidak mengalami fluktuasi, pengangguran, dan inflasi.

PEMBAHASAN

Menyeimbangkan peran ketiga pihak yaitu akademisi, pengusaha, dan pemerintah (ABG) bukanlah hal mudah. Untuk itu, diperlukan upaya yang berkesinambungan dan dinamis, sehingga setiap pihak diharapkan selalu open-minded dan berusaha melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Ketiga pihak tidak dapat bergerak sendiri, oleh karena itu diperlukan kerjasama yang sinergis dan seimbang. Teori tentang Triple Helix mengungkapkan pentingnya penciptaan sinergi tiga kutub yaitu akademisi, pengusaha, dan pemerintah di Indonesia yang dikenal sebagai konsep ABG, dengan tujuan untuk pengembangan kewirausahaan. Sinergi ketiga unsur itu diharapkan membuat sirkulasi ilmu pengetahuan yang berujung pada inovasi yang memiliki potensi ekonomi atau kapitalisasi. Triple Helix sebagai aktor utama harus selalu bergerak melakukan sirkulasi untuk membentuk ruang pengetahuan sehingga ketiga aktor dapat memiliki kesetaraan dan keselarasan pemahaman dan pengetahuan. Hal ini akan mengarahkan ketiga unsur sebagai aktor pembentuk ruang kesepakatan dan komitmen untuk pengembangan kewirausahaan. Pada akhirnya, ruang kesepakatan dan komitmen untuk pengembangan kewirausahaan akan mengarah pada terbentuknya ruang inovasi yang dapat dikemas menjadi strategi dalam pengembangan kewirausahaan di Indonesia.

Ruang inovasi sebagai strategi pengembangan kewirausahaan ditunjukkan pada Gambar 1 melalui bagian irisan lingkaran A, B, dan G pada Triple Helix. Dalam kondisi nyata, ruang inovasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat berupa kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dananya dialokasikan dari pemerintah sebagai bentuk fungsi distribusi dan stabilisasi melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan

Negara/Daerah (APBN/APBD) dan perusahaan melalui kegiatan CSR. Dengan demikian, dana APBN/APBD dapat digunakan untuk memotivasi penelitian-penelitian agar melahirkan ide kreatif pengembangan kewirausahaan yang aplikatif, sedangkan dana APBN/APBD yang disalurkan untuk pengabdian masyarakat dimaksudkan agar kontribusi perguruan tinggi terhadap masyarakat bersifat nyata dan langsung dirasakan manfaatnya. Harapannya ada umpan balik dari masyarakat kepada perguruan tinggi sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Irisan lingkaran A, B, dan G pada Gambar 2 sebagai ruang inovasi menuntun banyak hal berdasarkan hasil-hasil penelitian yang disebutkan sebelumnya agar menjadi pilihan strategi pengembangan kewirausahaan di Indonesia. Berdasarkan pendekatan Triple Helix dan hasil-hasil penelitian tersebut, strategi pengembangan kewirausahaan di Indonesia dapat dilakukan melalui internal dan eksternal dari sisi pendidikan kewirausahaan di Perguruan Tinggi. Berdasarkan sisi internal, strategi pengembangan kewirausahaan di Indonesia dilakukan melalui pendidikan entrepreneur yang diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan dengan mendisain kurikulum kewirausahaan (Rachmat, 2012 dan Nursisto, 2013) dan diukur dengan indikator initiative dan enterprises, planning dan organizing, teknologi, dan orientasi (Isa, 2011). Desain kurikulum kewirausahaan (Entrepreneurial Learning Model atau ELM) ini untuk mengurangi kesenjangan kompetensi kewirausahaan antara industri dan mahasiswa (Mulyatiningsih, 2013; Sony, 2013; dan Pujiastuti (2013).

Berdasarkan sisi eksternal, strategi pengembangan kewirausahaan di Indonesia dilakukan melalui upaya sistematis dan kompleks yang membutuhkan sinergitas multipihak dengan pendekatan Triple Helix yang melibatkan kerjasama tiga unsur, yaitu perguruan tinggi, perusahaan, dan pemerintah (Soeprapto, 2013). Lingkungan eksternal perguruan tinggi, yaitu perusahaan dan pemerintah sebagai lingkungan sosial sekunder akan mempengaruhi keberhasilan strategi pengembangan kewirausahaan di Indonesia. Dalam perkembangannya, strategi pengembangan kewirausahaan di Indonesia dengan pendekatan Triple Helix memerlukan pemberdayaan masyarakat (community development) sebagai sebuah proses pembangunan jejaring interaksi dalam rangka meningkatkan kapasitas, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan

pengembangan kualitas hidup komunitas.

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah bentuk proses pembangunan dengan inisiatif yang mengawali proses kegiatan sosial berasal dari masyarakat itu sendiri. Tujuannya adalah untuk memperbaiki situasi dan kondisi dirinya sendiri. Kesuksesan pemberdayaan masyarakat bergantung pada partisipasi warganya. Upaya pemberdayaan masyarakat dinyatakan berhasil apabila kelompok komunitas atau masyarakat telah dapat menjadi agen atau subyek pembangunan. Subyek merupakan motor penggerak dan bukan obyek penerima manfaat saja (Jayagiri, 2012).

Pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu deficit based dan strength based. Pendekatan deficit-based terpusat pada berbagai macam permasalahan yang ada serta cara-cara penyelesaiannya. Keberhasilannya tergantung pada adanya identifikasi dan diagnosis yang jelas terhadap masalah, penyelesaian cara pemecahan yang tepat, serta penerapan cara pemecahan tersebut. Pendekatan strength-based dilakukan dengan sebuah metode appreciative inquiry yang terpusat pada potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh individu atau organisasi untuk menjadikan hidup lebih baik. Appreciative inquiry merupakan metode yang mentransformasikan kapasitas sistem manusia untuk perubahan yang positif dengan memfokuskan pada pengalaman positif dan masa depan yang penuh dengan harapan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka disimpulkan bahwa pengembangan kewirausahaan di Indonesia dapat dilakukan dengan memperhatikan perspektif keterkaitan berbagai pihak dengan komitmen dan kerja nyata dari ketiga aspek yang disebut sebagai Triple Helix yang meliputi A (academician), B (businessman), dan G (government). Triple Helix merupakan salah satu solusi dari kendala-kendala yang dihadapi oleh para pelaku ekonomi dan mawadahi terciptanya “simbiosis mutualistis” antara ketiga pihak yang terlibat di dalamnya. Hubungan yang lebih terbuka dan saling menguntungkan diharapkan dapat dilakukan antara pihak akademisi (perguruan tinggi) dengan pemerintah, akademisi (perguruan tinggi) dengan

pengusaha, dan pengusaha dengan pemerintah dalam sebuah irisan antara ketiga hubungan tersebut. Berdasarkan pendekatan Triple Helix, strategi pengembangan kewirausahaan di Indonesia dapat dilakukan melalui internal dan eksternal dari sisi pendidikan kewirausahaan di Perguruan Tinggi. Berdasarkan sisi internal, strategi pengembangan kewirausahaan di Indonesia dilakukan melalui pendidikan entrepreneur yang diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan dengan mendisain kurikulum kewirausahaan dan diukur dengan indikator initiative dan enterprises, planning dan organizing, teknologi, serta orientasi untuk mengurangi kesenjangan kompetensi kewirausahaan antara industri dan mahasiswa. Berdasarkan sisi eksternal, strategi pengembangan kewirausahaan di Indonesia dilakukan melalui upaya sistematis dan kompleks yang membutuhkan sinergitas multipihak dengan pendekatan Triple Helix yang didukung adanya pemberdayaan masyarakat.

Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, maka disampaikan saran bahwa Perguruan Tinggi hendaknya menyelenggarakan pendidikan entrepreneur yang diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan yang didukung adanya pemberdayaan masyarakat agar memberikan kerangka kerja bagi dunia pendidikan mengenai bagaimana menumbuhkembangkan dan memelihara semangat entrepreneurship dengan mendisain kurikulum kewirausahaan yang berbasis pada penguatan keyakinan atas kemampuan diri serta pada penguatan hal-hal yang merefleksikan semangat entrepreneurship. CSR yang dilakukan perusahaan serta alokasi kegiatan dan anggaran pembangunan dari pemerintah hendaknya disinergikan dengan pengembangan kewirausahaan yang dilakukan Perguruan Tinggi sehingga Entrepreneurial Learning Model atau ELM dari Perguruan Tinggi dapat mengurangi kesenjangan kompetensi kewirausahaan antara industri dan mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

A+ CSR Indonesia. 2010. “Tanya Jawab CSR di Indonesia”. <http://www.csrindonesia.com>. Diakses

- pada tanggal 25 Mei 2014.
- Badan Pusat Statistik. 2013. Indikator Ekonomi Tahun 2013. Jakarta.
- Badrudin, R. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- _____. 2013. *Potret Perekonomian Indonesia*. Penerbit Gosyen. Yogyakarta.
- Elisawati, V. 2008. "Mengintip CSR di Indonesia". <http://vlisa.com/2008/04/07/mengintip-csr-di-indonesia.html>. Diakses pada tanggal 24 Mei 2014.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2014. "Cuma 1,56%, BI Nilai Kewirausahaan di Indonesia Perlu Ditingkatkan". <http://ikatanbankir.com/ibi/news.php?id=1756>. Diakses pada tanggal 20 Mei 2014.
- Isa, Muzakar. 2011. "Analisis Kompetensi Kewirausahaan, Orientasi Kewirausahaan, dan Kinerja Industri Mebel". *BENEFIT Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 15(2): 159-168.
- Jayagiri, H. 2012. "Menciptakan Masyarakat Pembelajar". <http://www.hidayatjayagiri.net/2013/06/menciptakan-masyarakat-pembelajar.html>. Diakses pada tanggal 24 Mei 2014.
- Kadiman, K. 2005. "The Triple Helix and The Public". Paper, dipresentasikan pada Seminar on Balanced Perspective in Business Practices, Governance, and Personal Life di Jakarta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2013. *Pedoman Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) Tahun 2013*. Jakarta.
- Kompas. 2014. "Wirausaha Mutlak untuk Sintas dan Maju". 14 September 2014, hal. 15.
- Kotler, P. and N. Lee. 2004. *Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*. John Wiley & Sons. Singapore.
- Meredith, Geoffrey G., Robert E. Nelson, Philip A. Neek. 2002. *Kewirausahaan: Teori dan Praktik*. Seri Manajemen Strategis No. 1. Penerbit PPM. Jakarta.
- Mulyatiningsih, Endang. 2013. "Analisis Kesenjangan Kompetensi Kewirausahaan antara Industri dan Mahasiswa Teknik Boga". http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Dra.%20Endang%20Mulyatiningsih,%20M.Pd./3B_Analisis%20Kesenjangan%20Kompetensi%20Kewirausahaan%20antara%20Mahasiswa%20dengan%20Industri.pdf. Diakses pada tanggal 29 Mei 2014.
- Nursisto, Sarwono dan Arif Julianto Sri Nugroho. 2013. "Analisis Pengaruh Interaksi Pengetahuan Kewirausahaan dan Efikasi Diri terhadap Intensi Kewirausahaan". *Kiat Bisnis*, 5(2): 1480158.
- Pujiastuti, Eny Endah. 2013. "Pengaruh Kepribadian dan Lingkungan terhadap Intensi Berwirausaha pada Usia Dewasa Awal". *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*, 2(1): 1-8.
- Rachmat, Muhammad. 2012. "Entrepreneur sebagai Pilihan Karir Mahasiswi Maluku Utara: Peran Efikasi Diri dan Kepribadian". *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*, 1(3): 186-197.
- Setyawati, dkk. 2011. *Ekonomi Mikro Pengantar*. Edisi 3. Bagian Penerbitan STIE YKPN. Yogyakarta.
- Soeprapto, Adi. 2013. "Sinergi Kalangan Akademik Dunia Usaha dan Pemerintah dalam Program Pengembangan Budaya Kewirausahaan Mahasiswa". http://www.researchgate.net/publication/255484024_Sinergi_Kalangan_Akademik_Dunia_Usaha_Dan_Pemerintah_Dalam_Program_Pengembangan_Budaya_Kewirausahaan_Mahasiswa. Diakses pada tanggal 29 Mei 2014.
- Sony, Maria. 2013. "Transformasi Pembelajaran Berbasis An Entrepreneurial Learning dalam

Meningkatkan Jiwa Wirausaha Mahasiswa
untuk Mengatasi Pengangguran Intelektual”.
Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan, 2(1): 42-50.